

SKRIPSI

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**



Diajukan Oleh

RINA

NIM. 1810211120011

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret, 2023**

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK
PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**RINA
1810211120011**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP
PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA**

Diajukan oleh

RINA
1810211120011

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 27 Maret 2023 dan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,


Deden Koswara, S.H., M.H
NIP.1997309232000031001

Pembimbing Pendamping


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP.198309032009121002

Diketahui,
Banjarmasin, 27 Maret 2023
Ketua Program


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP.19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Diajukan oleh

RINA
1810211120011

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 177/UN8.1.11/Sp/2023

Tanggal : 03 APR 2023

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RINA
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120011
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pangga, 12 juli 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2023
Yang membuat pernyataan


RINA
NIM. 1810211120011

C5AKX363337353

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan siding panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum

Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H

Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H

Deden Koswara, S.H., M.H

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., MH



Rina

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Dakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat

Nomor : 397 / UN8.1.11 / SR / 2023

Tanggal : 20 Maret 2023

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Keadilan tidak bisa untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya (**kata bijak Eleanor Roosevelt**)

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini di persembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahanda dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Bahrn** dan **Sukmawati**, yang telah melahirkan, merawat ,menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa ,cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang

Diucapkan kepada kakak tercinta **Wahyu** dan adikku tersayang **Muhammad Abdan hanafi, Muhammad Yusuf, Aisyah Afiqa Inara**,atas dorongan dan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada bapak **Deden Koswara, S.H.,M.H** dan bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Rina. Maret 2023. **PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama : Deden Koswara, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Untuk mengakomodir kepentingan pembangunan desa pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum berupa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adanya undang-undang inipun untuk mengakomodir semua pihak yang berkepentingan baik dari unsur Pemerintahan desa maupun kepentingan hak dan kewajiban masyarakat desa. Akan tetapi setelah di sahkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam struktur kehidupan sosial penyalahgunaan dana APBDesa untuk pembangunan yang dilakukan oleh sekelompok orang masih sering terjadi di Indonesia. Pengawasan yang telah diatur di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa masih belum maksimal dijalankan oleh sebagian sistem pemerintahan desa karena perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sistematisa pengawasan terhadap penggunaan dana APBDesa untuk pembangunan, dana yang besar untuk pembangunan desa harus diawasi secara bersama untuk menghindari penyalahgunaan dana yang terhimpun di APBDesa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan hukum yang di peroleh diolah dan dianalisa dengan cara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pengawasan masyarakat yang di atur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum bisa di implementasi dengan baik karena partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan APBDesa sangat kurang dan masyarakat terlalu mengandalkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan, hal ini akan sangat berbahaya apabila kapasitas dan kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa kurang mumpuni akan sangat mungkin terjadi *abuse of power* yang dilakukan pemerintah desa.
2. Pengawasan penggunaan APBDesa untuk pembangunan dibedakan menjadi pengawasan internal dan eksternal. Masyarakat selaku pengawas internal bisa menyampaikan dugaan penyalahgunaan penggunaan APBDesa dengan beberapa tahap yaitu mengadukan ke Badan Permusyawaratan Desa selaku sesama pengawas internal serta melaporkan ke camat dan APIP selaku pengawas eksternal.

Rina. Maret 2023. **PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 72 halaman. Pembimbing Utama : Deden Koswara, S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sistematika pengawasan terhadap penggunaan dana APBDesa untuk pembangunan, dana yang besar untuk pembangunan desa harus diawasi secara bersama untuk menghindari penyalahgunaan dana yang terhimpun di APBDesa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pengawasan penggunaan APBDesa untuk pembangunan.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pengawasan masyarakat yang diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum bisa diimplementasi dengan baik karena partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan penggunaan APBDesa sangat kurang dan masyarakat terlalu mengandalkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam fungsi pengawasan, hal ini akan sangat berbahaya apabila kapasitas dan kapabilitas Badan Permusyawaratan Desa kurang mumpuni akan sangat mungkin terjadi *abuse of power* yang dilakukan pemerintah desa. **Kedua**, Pengawasan penggunaan APBDesa untuk pembangunan dibedakan menjadi pengawasan internal dan eksternal. Masyarakat selaku pengawas internal bisa menyampaikan dugaan penyalahgunaan penggunaan APBDesa dengan beberapa tahap yaitu mengadukan ke Badan Permusyawaratan Desa selaku sesama pengawas internal serta melaporkan ke camat dan APIP selaku pengawas eksternal.

Kata Kunci: Pengawasan Masyarakat, APBDesa, Penyalahgunaan Kekuasaan, Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kelancaran serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian berupa skripsi yang berjudul, “PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014”. Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Program Strata I (S-I). Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan karena keterbatasan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman sehingga penulis terbuka dalam menerima saran atau kritik yang membangun. Penelitian ini tidak lepas pula dari bantuan, dukungan, dan doa dari banyak pihak sehingga penulis mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Dr, Saprudin, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr, Suprpto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. Bapak Dr, Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
5. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing ketua yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar Mata Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama berkuliah di kampus ini.

8. Seluruh Staff/Pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
9. Terkhusus sahabat penulis squad noob queen yang selalu memberikan doa serta dukungan berupa fisik dan mental, yang sudah seperti keluarga dan selalu hadir dalam suka maupun duka ,Tasya Yulistiani, Yunita Maudy Hasanah, S.H, dan Nabila Faza Putri Saladin, S.H, dan Yurni Isra Wahyuni
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan serta balasan yang berlipatlipat atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Penulis,

Rina

1810211120011



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	IV
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	V
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	VI
RINGKASAN	VII
ABSTRAK	VVIII
UCAPAN TERIMA KASIH.....	IX
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH	11
C. KEASLIAN PENELITIAN.....	11
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. METODE PENELITIAN	13
F. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II TINAJUAN PUSTAKA	
A. DESA	19
B. PEMERINTAHAN DESA	21
C. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	24
D. TAHAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	26
E. PARTISIPASI MASYARAKT DALAM PENGAWASAN APBDESA.....	27
F. TINDAK PIDANA KORUPSI DAN JENIS-JENIS KORUPSI.....	29
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN	
A. KETENTUAN HUKUM TENTANG PENGAWASAN MASYARAKAT TENTANG PENGGUNAAN APBDESA UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA	37
B. BENTUK PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN APBDESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA.....	53
BAB IV PENUTUP	
A. SIMPULAN	71

B. SARAN 71

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN MENGGUNAKAN JILBAB PADA PAS FOTO



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 NRI

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 Tentang Desa Praja

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah desa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Keuangan Desa

